

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* DI DALAM *SUSTAINABILITY REPORT***

**MEIDA LISTIYANA
8335145413**



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar **Sarjana
Ekonomi** pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 ALIH PROGRAM AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

The Influence of Corporate Governance and Profitability To Corporate Social Responsibility in Sustainability Report

MEIDA LISTIYANA
8335145413



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
THE CONCENTRATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2016**

ABSTRAK

MEIDA LISTIYANA. Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit sebagai bagian dari *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki *annual report* dan *sustainability report* selama periode 2011-2015 berturut-turut. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* dimana didapat 8 perusahaan yang mengeluarkan *annual report* dan *sustainability report* selama 5 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan 40 sample. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif dan Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report* secara parsial, sedangkan Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report* secara parsial. Selain itu juga didapatkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report* secara simultan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, *Sustainability Report*

ABSTRACT

MEIDA LISTIYANA. *The Influence of Corporate Governance and Profitability To Corporate Social Responsibility in Sustainability Report. Faculty Of Economics, State University of Jakarta. 2016*

This research aim to to get the empirical evidence hit the Independent Board Of Comisioner influence, Ownership Of Institutional, Committee Make an audit of as part of Corporate Governance and Profitability to expression of Corporate Social Responsibility. Examinee Factors in this research is Independent Board Of Comisioner, Ownership Of Institutional, Committee Make an audit of and Profitability as independent variable while Corporate Social Responsibility as variable dependen.

This research use the data sekunder by sampel is mining company enlisted in Effect Exchange of Indonesia owning annual report and sustainability report of during period 2011-2015 successively. In this research is used by method of purposive sampling of where got by 8 company releasing annual report and sustainability report of during 5 year successively, is so that got by 40 sample. This research uses multiple linear regresion method to test the hypothesis at a significance level of 5%.

From result analyse performed in this research, it can be concluded that the Ownership of Institutional have an effect on the negative signifikan and Committee Make an audit of to have an effect on the positive signifikan to Corporate Social Responsibility in Sustainability Report parsially, while Independent Board Of Comisioner and Profitability not have an effect on the signifikan to Corporate Social Responsibility in Sustainability Report by parsially. Others is also got result that Independent Board Of Comisioner, Ownership Of Institutional, Committee Make an audit of and Profitability have an effect on the signifikan to Corporate Social Responsibility in Sustainability Report simultaneously.

Keyword: Corporate Social Responsibility, Independent Board Of Comisioner, Ownership Of Institutional, Committee Make An Audit Of, Profitability, Sustainability Report

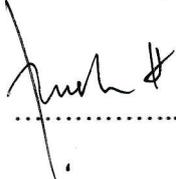
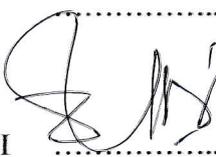
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		10/1/17
2. <u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Penguji Ahli		10/1/17
3. <u>Indah Mulia Sari, SE, M.Si</u> NIDK. 886100016	Sekretaris		11/1/17
4. <u>Dr. Etty Gurendrawati, SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Pembimbing I		10/1/17
5. <u>Dr. Rida Prihatni SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Pembimbing II		18/1/17

Tanggal Lulus : 29 Desember 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan



Meida Listiyana

No. Reg. 8335145413

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Penyusunan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, do’a dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati SE, Akt, M.Si dan Ibu Dr. Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si selalu Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan laporan ini.
4. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis atas segala dorongan moral, spiritual, dan materi yang telah diberikan.

6. Seluruh teman-teman S1 Alih Program Akuntansi 2014 atas kebersamaan, semangat dan motivasinya selama ini.
7. Achmad Subakri, A. Md. atas waktu, dukungan dan semangat yang diberikan dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh karyawan Frontier Consulting Group yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu dalam berbagai hal, sehingga membantu kelancaran dalam proses pembuatan Skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulisa mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2016

Meida Listiyana, A.Md.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	14
A. Deskripsi Konseptual.....	14
1. Teori Legitimasi	14
2. Teori Keagenan	15
3. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	17

3.1.	Konsep dan Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	17
3.2.	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	18
4.	<i>Corporate Governance</i>	21
4.1.	Dewan Komisaris Independen	22
4.2.	Kepemilikan Institusional	23
4.3.	Komite Audit	24
5.	Profitabilitas Perusahaan	25
B.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
C.	Kerangka Pemikiran.....	34
1.	Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan CSR	34
2.	Hubungan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR	36
3.	Hubungan Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR	37
4.	Hubungan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR	38
D.	Perumusan Hipotesis Penelitian	40
1.	Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap CSR di dalam <i>Sustainability Report</i>	40
2.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap CSR di dalam <i>Sustainability Report</i>	41
3.	Pengaruh Komite Audit Terhadap CSR di dalam <i>Sustainability Report</i>	42

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap CSR di dalam <i>Sustainability Report</i>	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Tujuan Penelitian.....	44
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	44
C. Metode Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
1. Populasi Penelitian	45
2. Sampel Penelitian	46
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	46
1. Variabel Dependen	47
1.1 Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	47
2. Variabel Independen	48
2.1 Dewan Komisaris Independen	48
2.2 Kepemilikan Institusional	49
2.3 Komite Audit	50
2.4 Profitabilitas	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
1. Uji Statistik Deskriptif.....	52
2. Uji Asumsi Klasik.....	52
2.1. Uji Normalitas.....	53

2.2. Uji Multikolinearitas.....	53
2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	54
2.4. Uji Autokorelasi.....	55
3. Uji Analisis Regresi Berganda.....	56
4. Uji Hipotesis.....	57
4.1. Uji Signifikansi Simultan.....	57
4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual.....	58
4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Deskripsi Data	59
1. Hasil Penelitian Sampel	59
2. Analisis Deskriptif	60
2.1. Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	61
2.2. Dewan Komisaris Independen	62
2.3. Kepemilikan Institusional	63
2.4. Komite Audit	64
2.5. Profitabilitas	64
B. Pengujian Hipotesis.....	65
1. Uji Asumsi Klasik	65
1.1 Uji Normalitas	65

1.2 Uji Multikolinieritas	67
1.3 Uji Heterokedastisitas	70
1.4 Uji Autokorelasi	71
2. Uji Analisis Regresi Berganda	72
3. Uji Hipotesis	74
3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	74
3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	76
3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78
C. Pembahasan	79
1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	79
2. Pengaruh Kepemilikan Institusinal Terhadap <i>Corporate Social</i> <i>Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	82
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	84
4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i>	86
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Implikasi.....	91
C. Saran Penelitian	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel: Judul	Halaman
II.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu.....	29
IV.2 Jumlah Sampel Penelitian	60
IV.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	61
IV.4 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov	67
IV.5 Hasil Uji Multikolinearitas (<i>Coefficient</i>).....	68
IV.6 Hasil Uji Multikolinieritas (<i>Coefficient Correlations</i>)	69
IV.7 Hasil Uji Glejser	71
IV.8 Hasil Uji Durbin Watson	71
IV.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	73
IV.10 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji-F)	75
IV.11 Hasil Uji Parsial (Uji-T)	76
IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Judul	Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
1.	Daftar Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI
2.	Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan
3.	Daftar Rekap Variabel Dependen & Varibel Independen
4.	Daftar Indikator Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut GRI (Y)
5.	Hasil Pengelolaan Daftar Statistik
6.	Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Skripsi
7.	Kartu Format Saran dan Perbaikan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tapi tanggung jawab perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. CSR Asia seperti dikutip Nurkhin (2009) memberikan definisi CSR sebagai berikut: *CSR is a company's commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders*. Konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemilik atau pemegang saham saja namun juga terhadap *stakeholder* yang terkait dengan dampak dari keberadaan perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap tindakannya yang mempengaruhi orang-orang, masyarakat, dan lingkungan mereka. Program CSR di sini dapat membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi efektif antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Menjalankan tanggung jawab sosial menjadi hal yang sangat penting saat ini, karena dengan menjalankan CSR tersebut dapat membuat perusahaan mendapatkan simpati dan nilai yang positif dari

masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan keuntungan untuk masa depan perusahaan dalam jangka panjang.

Perkembangan CSR ini memiliki keterkaitan dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia salah satunya Indonesia, baik itu pengundulan hutan, polusi udara dan air, hingga terjadinya perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah kasus PT Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Pengungkapan tanggung jawab sosial dipilih sebagai salah satu media yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya.

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi pemerintah juga mulai melatarbelakangi praktik dan pengungkapan CSR, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban perusahaan dari praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Pasal 66 ayat 2c, mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atau pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. CSR dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Pemerintah juga mengatur pelaksanaan CSR di sektor pasar modal melalui Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan, bentuk dan isi laporan tahunan. Pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan baru itu antara lain berupa pengungkapan informasi lebih rinci terkait profil perusahaan, dewan komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit, hubungan afiliasi antara anggota dewan komisaris, direksi dan pemegang saham serta sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, masyarakat bersikap lebih kritis terhadap kegiatan perusahaan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk dapat memberikan informasi mengenai aktivitas sosial perusahaan. Tuntutan masyarakat ini untuk mengetahui sudah sejauh mana tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan

tentram dalam menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Profitabilitas memiliki peranan penting dalam memberikan keyakinan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari masyarakat. Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Paradigma yang dianut oleh perusahaan kebanyakan adalah *profit oriented*. Perusahaan yang dapat memperoleh laba besar dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik. Hal ini dikarenakan profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan.

Fenomena mengenai perkembangan CSR yang diungkapkan dalam A+ CSR Indonesia tahun 2013 menyatakan bahwa tantangan dan peluang berkembang CSR pada negara-negara Asia mengisik benak banyak orang terutama dari kalangan perusahaan, aktivis maupun para pakar. Di Indonesia sendiri isu yang paling sering didiskusikan adalah bagaimana perusahaan menjalankan CSR, terutama dalam keberhasilan perusahaan. Pembicaraan mengenai topik ini membawa semangat dan manfaat, karena dapat memberikan penegasan bahwa peluang dapat diwujudkan. Namun disisi lain, pembicaraan tersebut memiliki ketimpangan dalam fakta. Tantangan-tantangan mengenai pemahaman tentang CSR yang beragam, baik perusahaan dan pemangku kepentingan di Indonesia yang masih belum memiliki pemahaman yang sesuai dengan definisi CSR,

tantangan lain yang dihadapi para manajer dan direktur CSR adalah untuk membuktikan CSR bukan hanya sekedar biaya melainkan sebagai investasi yang memberikan keuntungan pemangku kepentingan dan perusahaan, serta bagaimana tantangan dapat ditaklukan oleh perusahaan dan mitranya masih kurang dikenali di Indonesia. Menurut Priantana & Yustian (2011) dan Putri & Christiawan (2014) saat ini CSR tidak lagi dikaitkan hanya dengan dampak negatif atau tantangan yang dihadapi perusahaan. CSR merujuk pada kondisi yang tidak hanya sekedar menguntungkan para penerima manfaat yang biasanya adalah pemangku kepentingan eksternal, melainkan juga menguntungkan perusahaan yang melaksanakannya. Dengan adanya program CSR diharapkan perusahaan mampu untuk memberikan bentuk tanggung jawab mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dengan perkembangan CSR yang terjadi, perusahaan mulai menyadari bahwa perusahaan tidak hanya memberikan informasi keuangan saja namun juga menyediakan informasi mengenai sosial dan lingkungan, yang kemudian disebut *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman standar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990an dan disusun tersendiri secara terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan.

Dengan menganalisis perkembangan CSR, didapatkan bahwa terdapat keterbatasan alam dalam mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga lingkungan sosialnya. Para akuntan di Indonesia telah turut menyadari bahwa pentingnya penyusunan *sustainability report* karena didalamnya terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan tentu saja berbeda dengan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya hal tersebut kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa khususnya pada investor dan kreditor (bank) karena investor maupun kreditor tidak mau mengganggu kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. (Priantana & Yustian, 2011 dan Mutia dkk, 2011)

Penelitian mengenai pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* di Indonesia masih sedikit dilakukan namun saat ini pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sudah semakin mendapatkan perhatian dalam praktik bisnis dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Para pemimpin perusahaan juga semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (yang tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain dapat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap *sustainable development*. Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan membangun legitimasi perusahaan.

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006), menyatakan bahwa seiring meningkatnya masyarakat terhadap kelestarian lingkungan membuat perusahaan semakin meningkatkan pertanggung jawaban sosial dan lingkungannya bukan hanya kepada pemegang saham dan kreditur saja, namun juga kepada masyarakat luas. CSR adalah suatu cara dari organisasi untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya. Kiroyan (2006) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam

jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR diharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup beragam. Anggraini (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. Variabel persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri terbukti memiliki hubungan yang positif signifikan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian dari Iswandika, Murtanto & Sipayung (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Begitu juga dengan penelitian Nugroho dan Yulianto (2015) yang menyatakan hipotesis profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR tidak diterima atau dapat dikatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Nurkhin (2010) menyatakan hasil penelitian yang berbeda karena dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang sama yang dimiliki oleh Ramdhaningsih dan Utama (2013) dengan menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR.

Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial juga dikaitkan dengan *corporate governance*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dapat

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dilihat dari definisi tersebut yang menyatakan bahwa *corporate governance* sebagai sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali sehingga perusahaan dapat melaksanakan dan mengungkapkan aktifitas CSRnya. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa komponen *corporate governance*, diantaranya dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Penelitian yang berkaitan antara *corporate governance* dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Nurkhin (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan komposisi dewan komisaris independen terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Riharjo (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini tidak senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dan komposisi dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak memberikan pengaruh pada pengungkapan CSR.

Hasil tidak konsisten yang terlihat dalam pengaruh antara variabel profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh

beberapa peneliti menunjukkan fenomena yang menarik dan perlu adanya pengujian ulang. Demikian pula dengan pengujian antara *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang sudah cukup banyak dilakukan. Namun hasilnya belum bisa dijadikan untuk men-*judgment* pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Fenomena lain yang ingin penulis gali adalah pengungkapan CSR yang berada di dalam *sustainability report*.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility* Didalam *Sustainability Report*”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya Nurkhin (2010) dan Putri (2013). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* (Priantana dan Yustian, 2011; Susanti dan Riharjo, 2013) dan profitabilitas (Anggraini, 2006; Nurkhin, 2010; Ramdhaningsih dan Utama, 2013). Variabel mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari yang digunakan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan subvariabel komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit sebagai indikator dalam *corporate governance* yang digunakan karena variabel-variabel tersebut dapat melakukan kontrol dan monitoring terhadap aktivitas perusahaan, salah satunya adalah dalam pengungkapan CSR. Variabel independen selain mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas.

Profitabilitas secara teoritis mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report*, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report* yang masih sangat jarang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia.
2. Peran dewan komisaris yang keberadaannya dalam perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan dalam pengungkapan CSR.
3. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dapat memantau pengambilan keputusan dalam perusahaan.
4. Tingkat profitabilitas yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan yang memiliki *sustainability report* dan *annual report* pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia dengan menggunakan variabel dependen Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan variabel independen Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Profitabilitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report* ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report* ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti baru mengenai komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report*.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi perusahaan dan masyarakat.

a. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan yang membutuhkan untuk mengetahui indikator *corporate governance* apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* terutama dalam *sustainability report*.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan di dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi. 2011:87). Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda.

Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Dapat diartikan bahwa, dengan mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas yang mencukupi, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

2. Teori Keagenan

Dalam rangka memahami konsep *Corporate Governance* maka digunakan dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal* (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*prinsipal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Jensen dan Meckling (1976 dalam Saleh et al., 2008) menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana *principal* menyewa *agent* untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Perspektif keagenan dapat

digunakan sebagai acuan untuk memahami *corporate governance* (Wawo, 2010). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007).

Teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang diberikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk

meyakinkan agen, bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.

- c. Biaya Kerugian Residul (*residual cost*), merupakan nilai mata uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat dari perbedaan kepentingan.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Penerapan *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

3. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

3.1. Konsep dan Definisi *Corporate Social Responsibility*

Definisi mengenai *corporate social responsibility* sekarang ini sangatlah beragam. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* yang dikutip dalam Effendi (2009), tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. European Commission seperti dikutip Darwin (2008) mendefinisikan CSR sebagai berikut; *CSR is a company's commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders.*

Definisi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi CSR dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang disampaikan European Commission dan CSR Asia. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi.

3.2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Kata pengungkapan secara umum memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral

dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi berupa penyajian dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani kebutuhan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Ikatan Akutan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2007) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial

dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat *leverage* yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan (Anggraini, 2006).

Sustainability report adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penerapan *sustainability report* diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan yang didasarkan atas etika bisnis. *Sustainability report* pada prinsipnya ialah inisiatif bersama dari berbagai pihak dalam membangun kepedulian untuk peningkatan kinerja bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. (Effendi, 2012). *Sustainability report* digagas oleh GRI pada 1999 untuk menyajikan pelaporan informasi sosial, lingkungan dan keuangan secara terpadu dalam satu paket pelaporan korporasi. Pengembangan model *sustainability report* didasarkan pada teori *triple bottom line of business* (3-P) dari John Elkington (1997), yaitu apabila suatu korporasi ingin tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan maka korporasi harus peduli dan bertanggung jawab terhadap alam semesta (*planet*), masyarakat (*people*) dan pertumbuhan keuntungan bisnis itu sendiri (*profits*).

Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* yang bertujuan untuk mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Misi GRI sendiri adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik yang standar agar perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar *disclosures*. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Dari keenam dimensi terdapat 34 konstruk dan total seluruh item pengungkapan menurut *GRI* adalah 78 item. Seperti yang dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan pedoman *G4 Sustainability Reporting* (2013), beberapa prinsip yang dianut untuk mendefinisikan isi reportnya, yaitu : *Inclusivity, Relevance and Materiality, Sustainability Context, Completeness* (Firmansari, 2015). *GRI* sendiri merupakan organisasi yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Anggotanya berasal dari beragam pemangku kepentingan mulai dari perusahaan-perusahaan multinasional, akuntan, ahli hukum, konsultan, akademisi, sampai pada *non-government organization* (Urip, 2012).

4. Corporate Governance

Good corporate governance merupakan suatu aturan mengenai pengolahan perusahaan yang perlu diterapkan pada setiap perusahaan terutama

perusahaan public (BUMN). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001)* pengertian *corporate governance* adalah:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.”

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* dalam Effendi (2009), *Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikutip dalam Solihin (2009), *GCG* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) transparansi; 2) akuntabilitas; 3) tanggung jawab; 4) independensi; dan 5) kewajaran serta kesetaraan. Penerapan *corporate governance* memberikan empat sendiri manfaat seperti meningkatnya kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan, mengembalikan kepercayaan investor, dan meningkatkan kepuasan pemegang saham atas kinerja perusahaan.

4.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris independen memegang peranan penting dalam implementasi

corporate governance. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dewan komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* berperan penting tidak hanya melihat kepentingan pemilik tetapi juga kepentingan perusahaan secara umum. Dewan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *corporate governance*.

4.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan manajerial merupakan isu penting, sejak dipublikasikan oleh Jensen Meckling (1976) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan merasakan kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Terutama, dengan keikutsertaan manajer memiliki perusahaan, hal ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Wening dalam Permasari (2010) semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

4.3. Komite Audit

Komite audit dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satu tugasnya adalah komite audit yang memiliki tugasnya terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa, Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan

audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

5. Profitabilitas Perusahaan

Dalam keterkaitan *profitabilitas* Amran dan Devi (2008) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki profit besar harus aktif melakukan CSR. Dengan *profitabilitas* yang tinggi, akan memberikan kesempatan yang lebih kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial, Zaleha (2005) dalam Nur dan Priantinah (2012). Menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan.

Menurut Sembiring (2005):

“Penelitian ilmiah terhadap hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memperhatikan hasil yang sangat beragam. Akan tetapi Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argument dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca ”*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang negative terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.”

Penelitian tentang hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial atau tanggung jawab sosial menunjukkan hasil bahwa antar keduanya tidak ditemukan adanya hubungan (Sembiring 2005; Nugroho dan Yulianto, 2015; dan Iswandika dkk, 2014). Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya jumlah sampel dan periode pengamatan.

Beberapa pengukuran dalam menghitung rasio profitabilitas:

1. Laba Bersih atas Penjualan (*Net Profit Margin / NPM*)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penjualan. Cara menghitung NPM adalah dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Menurut Kasmir (2002) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan baik jika NPM yang dimiliki oleh perusahaan diatas rata-rata industri pada umumnya yakni di atas 20%.

2. Pengembalian Atas Total Aktiva (*Return On total Asset/ ROA*)

Pengembalian atas total aktiva dihitung dengan membagi laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap rata-rata total aktiva. Rasio ini menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan laba.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut Kasmir (2002), rata-rata industri untuk ROA adalah 30%. Perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai ROA di atas rata-rata industri.

3. Pengembalian Atas Total Ekuitas (*Return On total Equity/ ROE*)

Pengembalian atas total ekuitas dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Menurut Kasmir (2002), perusahaan dikatakan baik jika ROE yang dimiliki oleh perusahaan di atas rata-rata industri pada umumnya yakni di atas 40%.

Indikator variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity*, yaitu dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan ekuitas perusahaan. Pemilihan *Return on Equity* sebagai indikator dalam pengukuran variabel profitabilitas karena *return on equity* digunakan sebagai ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai *good corporate governance*, profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Karena saat ini laporan tanggung jawab sosial perusahaan sudah

dianggap penting baik hubungannya dengan investor maupun dengan masyarakat demi keberlanjutan perusahaan.

Ramdhaningsih dan Utama (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh indikator *good corporate governance* dan profitabilitas pada pengungkapan *corporate social responsibility*. GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Selain menggunakan indikator GCG, penelitian ini juga menggunakan profitabilitas untuk mengetahui pengungkapan dalam CSR. Dari 5 (lima) variabel independen yang digunakan hanya 1 (satu) variabel saja yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, yaitu profitabilitas. Sedangkan semua indikator GCG dalam penelitian dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR.

Nugroho dan Yulianto (2015) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR perusahaan di JII selama periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Dari 6 (enam) variabel independen yang diuji hanya terdapat 1 (satu) variabel independen yang berpengaruh positif terhadap CSR, yaitu kepemilikan institusional. Sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ramdhaningsih dan Utama (2013), yang menyatakan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, dalam penelitian ini profitabilitas justru sama sekali tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap

pengungkapan CSR, sedangkan dari mekanisme GCG yang digunakan terdapat 1 (satu) variabel yang berpengaruh.

Nurkhin (2010) meneliti pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR perusahaan. CSR perusahaan diukur kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, dan profitabilitas. Dari hasil penelitian ini, komposisi dewan komisaris sebagai indikator dari GCG memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Selain variabel tersebut, profitabilitas juga dalam penelitian ini dikatakan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dalam variabel profitabilitas dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih dan Utama (2013), dimana profitabilitas dikatakan memiliki pengaruh yang positif dalam pengungkapan CSR perusahaan.

Berikut adalah tabel tinjauan atas penelitian terdahulu:

Tabel II.1

Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Penulis/Penerbit Jurnal	Hipotesis Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Judul : Analisis Pengaruh Kriteria <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Penulis : Margaretha Dita Utari</p> <p>Penerbit : Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi</p>	<p>H1:Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan</p>	<p>Populasi dan Sampel</p> <p>Populasi : Perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI</p> <p>Sampel : Mengambil populasi yang bergerak di sektor industri barang konsumsi yaitu dari sub sektor farmasi dari tahun 2008-2012</p>	<p>H1: diterima</p> <p>H2: tidak diterima</p> <p>H3: tidak diterima</p> <p>H4: tidak diterima</p> <p>H5: tidak diterima</p>

	Tanjungpura, Vol. 3, No. 1, Agustus 2014 Hal. 53-80	tanggung jawab sosial perusahaan H4: Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan		
2.	Judul : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan <i>Cosmetics And Household</i> Penulis : Susi Susanti & Ikhsan Budi Riharjo Penerbit : Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 1 Nomor 1, Januari 2013	H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan H3: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan H4 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan H5 : Proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan H6 : Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan	Populasi dan Sampel Populasi: Seluruh perusahaan manufaktur khususnya dibidang <i>cosmetics and household</i> yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2011 Sampel: Semua anggota populasi dijadikan sampel	H1: tidak diterima H2: diterima H3: diterima H4: tidak diterima H5: diterima H6: tidak diterima
3.	Judul : Pengaruh Indikator <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Penulis : Amalia Ramdhaningsih & I Made Karya Utama	H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan CSR H2: Komisaris Independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR H3: Kepemilikan	Populasi dan Sampel Populasi: Seluruh perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 Sampel: 30 perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di	H1 tidak diterima H2 tidak diterima H3 tidak diterima H4 tidak diterima H5 diterima

	<p>Penerbit : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.2 (2013) : 368 – 386, ISSN : 2302-8556</p>	<p>manajerial berpengaruh positif pada pengungkapan CSR H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR H5: Profitabilitas berpengaruh positif pada pengungkapan CSR</p>	<p>BEI tahun 2009-2011</p>	
4.	<p>Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Penulis : Ryandi Iswandika, Murtanto, Emma Sipayung Penerbit : e-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Volume. 1 Nomor. 2 September 2014 Hal. 1-18 ISSN : 2339-0832</p>	<p>H1a : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H1b : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H1c : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H2a : Kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H2b : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H2c : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H2d : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H3 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>Populasi dan Sampel Populasi: Seluruh perusahaan yang tercatat di BEI per tanggal 31 Desember 2012 Sampel: Sampel berjumlah 119 perusahaan</p>	<p>H1a : tidak diterima H1b : tidak diterima H1c : tidak diterima H2a : tidak diterima H2b : diterima H2c : tidak diterima H2d : diterima H3 : diterima</p>
5.	<p>Judul: Pengaruh Profitabilitas Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar</p>	<p>H1 :Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H2 : Kepemilikan institusional</p>	<p>Populasi dan Sampel Populasi : Perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Indeks (JII)</i> Periode 2011-</p>	<p>H1 : tidak diterima H2 : diterima H3 : tidak diterima</p>

	<p>JII 2011-2013 Penulis : Mirza Nurdin Nugroho & Agung Yulianto Penerbit : Accounting Analysis Journal 4 (1) (2015)</p>	<p>berpengaruh positif terhadap CSR H3 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H5 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR H6 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>2013 Sampel : Sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan</p>	<p>H4 : tidak diterima H5 : tidak diterima H6 : tidak diterima</p>
6.	<p>Judul: Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penulis : Riha Dedi Priantana & Ade Yustian Penerbit : Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 1 Januari 2011, Hal. 65-78</p>	<p>Ha1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ha2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ha3 : Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ha4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ha5: Komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>Populasi dan Sampel : Populasi : Perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2008 Sampel : Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposice sampling</i>, dengan jumlah 70 pengamatan</p>	<p>Ha1 : diterima Ha2 : tidak diterima Ha3 : tidak diterima Ha4 : diterima Ha5 : diterima</p>
7.	<p>Judul : <i>Corporate Governace</i> dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan Penulis : Ahmad Nurkhin Penerbit : Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No. 1, Maret 2010, 46-55</p>	<p>H1a : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan H1b : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan H2 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif</p>	<p>Populasi dan Sampel : Populasi : Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sampel : Digunakan 80 sampel perusahaan</p>	<p>H1a : tidak dapat diterima H1b : dapat diterima H2 : dapat diterima</p>

		terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan		
8.	<p>Judul : Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i></p> <p>Penulis : Rafika Anggraini Putri dan Yulius Jogi Christiawan</p> <p>Penerbit : Business Accounting Review, Vol. 2, No. 1, 2014</p>	<p>H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p> <p>H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p> <p>H3 : <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap pengungkapan CSr</p>	<p>Populasi dan Sampel :</p> <p>Populasi : Perusahaan semua sektor yang mendapat penghargaan ISRA dan <i>listed (go public</i> di Indonesia)</p> <p>Sampel : 38 laporan perusahaan yang menjadi sampel akhir</p>	<p>H1 : tidak diterima</p> <p>H2 : tidak diterima</p> <p>H3 : tidak diterima</p>
9.	<p>Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI</p> <p>Penulis : Evi Mutia, Zuraida, & Devi Andriani</p> <p>Penerbit : Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4, No. 2, Juli 2011 Hal. 187-201</p>	<p>Ha1: Ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p> <p>Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p> <p>Ha3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p> <p>Ha4 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>Populasi dan Sampel :</p> <p>Pupolasi : Perusahaan yang mengeluarkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan tercatat di BEI 2006 - 2008</p> <p>Sampel : Perusahaan yang mengungkapkan CSR dan tercatat di BEI adalah 37 perusahaan</p>	<p>Ha1 : dapat diterima</p> <p>Ha2 : diterima</p> <p>Ha3 : tidak diterima</p> <p>Ha4 : diterima</p>
10.	<p>Judul : Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta)</p> <p>Penulis : Fr. Reni Retno Anggraini</p> <p>Penerbit : Simposium Nasional Akuntansi 9</p>	<p>H1 : Ada pengaruh positif jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan informasi sosial</p> <p>H2: Ada hubungan negatif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat <i>leverage</i></p> <p>H3 : Ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan ukuran perusahaan dan</p>	<p>Populasi dan Sampel :</p> <p>Populasi : Seluruh perusahaan yang <i>go public</i> di Bursa Efek Jakarta</p> <p>Sampel : Terdapat 1188 perusahaan yang memenuhi kriteria</p>	<p>H1 : tidak diterima</p> <p>H2 : tidak diterima</p> <p>H3 : tidak diterima</p> <p>H4 : tidak diterima</p>

	padang	tipe industri H4 : Ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat profitabilitas perusahaan		
--	--------	---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang semakin luas kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaporan serta pengungkapan CSR juga perlu untuk dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan karena banyak perusahaan saat ini yang menginginkan nilai positif dari masyarakat. Sehingga perusahaan akan memperoleh peningkatan laba dalam jangka waktu yang panjang.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dikaitkan dengan *corporate governance* dan profitabilitas. Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. Mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit adalah mekanisme yang dapat memberikan arahan dan kontrol terhadap perusahaan dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

1. Hubungan dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan

manajemen puncak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. (Coller dan Gregory, 1999 dalam Sembiring 2005). Dewan komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli 2004 dimana jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Keberadaan komisaris independen dapat mendorong Dewan Komisaris mengambil keputusan secara objektif yang dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan karena komisaris independen dapat bersifat netral dan objektif terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Dengan adanya dewan komisaris, pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi terutama terhadap kegiatan agen yang menyimpang sehingga manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian pengaruh dewan komisaris terhadap CSR yang dilakukan Nurkhin (2010) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lain dari Priantana dan Yustian (2011) menyatakan hal yang sama bahwa ukuran

dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara penelitian dari Nugroho dan Yulianto (2015) menyatakan hal yang berbeda karena dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR.

2. Hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR

Investor bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip *corporate governance* untuk dapat melindungi baik hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga secara otomatis pihak tersebut dapat menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pengungkapan sukarela. Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan.

Contoh kontrol yang dapat diberikan adalah memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktivitas positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Karena dasar pemikiran dari legitimasi ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat, karena dengan adanya penerimaan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan nilai dan laba perusahaan dan dapat membantu investor dalam pengambilan

keputusan. Kepemilikan institusional dapat memberikan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan aktivitas positif tersebut. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional.

Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan kepemilikan institusional terhadap CSR ini dilakukan oleh Nurkhin (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) dan Ramdhaningsih dan Utama (2013) yang sama-sama menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR. Namun sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho dan Yulianto (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap CSR.

3. Hubungan komite audit terhadap pengungkapan CSR

Untuk mendukung implementasi *Corporate Governance* maka dibuatlah organ tambahan dalam struktur perseroan yaitu komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen (Surat Keputusan Ketua Bapepam KEP-29/PM/2004). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 121 menjelaskan bahwa Komite Audit beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang berasal dari Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit

sangat bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit sendiri memiliki tugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan dengan tugas dewan komisaris (Bapepam LK No. IX.I.5).

Dengan adanya komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Karena anggota komite audit dapat bersikap netral terhadap manajemen, sehingga dapat bertindak secara objektif dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dan pada akhirnya dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Utari (2014) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan dan diungkapkan oleh Priantana dan Yustian (2011), Nugroho dan Yulianto (2015). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Susanti dan Riharjo (2013), dan Iswandika, dkk (2014) menyatakan hasil penelitian yang berbeda dengan menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

4. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR

Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba, yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Profitabilitas

memberikan keyakinan kepada perusahaan untuk melakukan pengungkapan tersebut. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas perusahaan telah menjadi postulat untuk menggambarkan pandangan bahwa tanggapan sosial memerlukan gaya manajerial yang sama seperti apa yang perlu dilakukan untuk membuat perusahaan menghasilkan laba, Achmad (2007). Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR untuk mendapatkan legitimasi dan nilai yang positif dari *stakeholder*. Profitabilitas merupakan faktor yang dapat membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan keluwesan kepada manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan sangat mempertimbangkan pelaksanaan dan pengungkapan CSR, karena khawatir akan mengganggu operasional perusahaan.

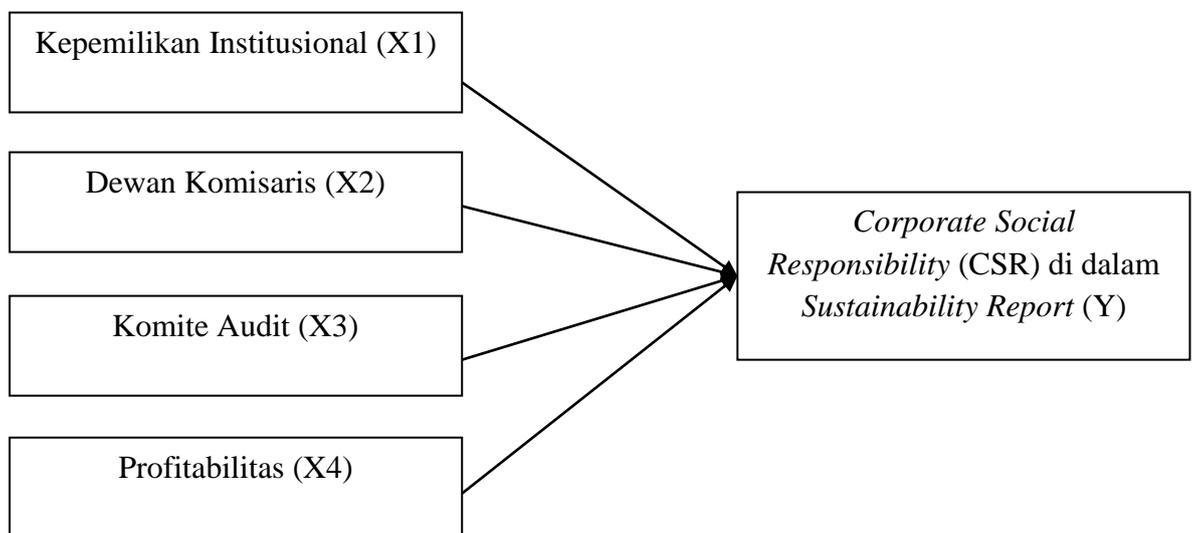
Penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010), Ramdhaningsih dan Utama (2013) membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan ketersediaan dana yang lebih untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya, sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. Secara teoritis, menurut Kokubu *et. al* (2001) adanya hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, dimana hal tersebut dikaitkan dengan teori agensi dengan

premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial secara lebih luas. Namun terdapat perbedaan dari penelitian lain yang dilakukan oleh Iswandika, dkk (2014), dan Nugroho dan Yulianto (2015) menyatakan hasil yang berbeda dengan menyatakan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan kajian teoritik dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap CSR di dalam *Sustainability Report*

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14

Juli tahun 2004. Berdasarkan aturan tersebut, jumlah dewan komisaris independen minimal adalah 30%. Ketentuan tersebut memberi pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam kegiatan perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan CSR. Pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen oleh komisaris independen adalah ketika manajemen tidak melakukan aktivitas yang sesuai dengan capaian yang telah ditentukan dan aktivitas lainnya yang dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud adalah pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas CSR. Komisaris independen dapat melakukan aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diambil hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap *Corporate Sosial Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap CSR di dalam *Sustainability Report*

Kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, sehingga dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri, namun juga memperhatikan para *stakeholder* lainnya (Nugroho dan Yulianto, 2015). Kontrol yang dapat diberikan salah satunya dengan memberikan arahan dan masukan ke manajemen saat manajemen tidak melakukan aktivitas positif seperti

pengungkapan CSR untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena dapat berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Kepemilikan institusional dapat memonitor manajemen untuk melakukan aktivitas positif. Dengan demikian pengungkapan CSR perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan penelitian hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

3. Pengaruh Komite Audit terhadap CSR di dalam *Sustainability Report*

Sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu melaksanakan tugas beserta fungsi dewan komisaris, komite audit memiliki tugas seperti menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, dan melaporkan kepada komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, selain itu komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan beserta informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya (Bapepam LK No. IX.I.5). Salah satu informasi yang diberikan perusahaan kepada *stakeholder* yaitu pengungkapan CSR. Besarnya komite audit dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme dalam *corporate governance*, diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen lebih baik dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, sehingga keinginan para *stakeholder* untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya ke publik dapat terjamin.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Komite Audit Berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR di dalam *Sustainability Report*

Profitabilitas memberikan keyakinan kepada perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR untuk mendapatkan simpati dan nilai positif dari *stakeholders*. Sehingga, Heinze (1976) dalam Nurkhin (2010) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen lebih bebas dan fleksibel dalam pengungkapan CSR kepada pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan kemudahan kepada manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan sangat mempertimbangkan pelaksanaan dan pengungkapan CSR, karena khawatir akan mengganggu kegiatan perusahaan.

Berdasarkan argumen diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Profitabilitas Berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan kerangka teoritik yang telah peneliti buat, maka secara rinci tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, objek yang menjadi sasaran penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada karakteristik perusahaan yang memiliki *annual report* dan *sustainability report*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen yaitu luas

pengungkapan *corporate social responsibility* dan 3 (tiga) variabel independen yang merupakan bagian dari *corporate governance*, yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, serta 1 (satu) variabel independen lain, yaitu profitabilitas.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan, orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel, adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian ini adalah karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia, selain itu perusahaan pertambangan bergerak dalam industri yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan memiliki peranan penting dalam menyampaikan laporan yang berhubungan dengan lingkungan hidup sekitarnya. Lama periode dalam penelitian ini adalah 5 tahun karena untuk mendapatkan jumlah data yang cukup, dikarenakan perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* masih kurang banyak. Alasan lain karena data 5 tahun terakhir yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan saat ini hingga 5 tahun terakhir sehingga dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.

2. Sampel Penelitian

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel harus merupakan bagian dari populasi, sehingga sampel yang diambil adalah benar-benar dapat mewakili populasinya (Mustofa, 1998 dalam Alfia, 2013).

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan *sustainability report* berturut-turut selama periode 2011-2015 dan dapat diakses melalui *website* perusahaan.
2. Perusahaan pertambangan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan secara berturut-turut selama periode 2011-2015.
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

E. OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan diuji variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report* perusahaan atau *corporate social disclosure index* (CSDI).

1.1. Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

1) Definisi Konseptual

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur luas pengungkapan CSR adalah metode analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kategori tergantung pada kriteria yang telah ditentukan (Sembiring, 2005). Pengukuran luas pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada atau tidaknya suatu *item* yang ditemukan dalam *sustainability report*, apabila *item* informasi tidak ada dalam *sustainability report* maka akan diberi skor 0, dan jika *item* informasi ditemukan dalam *sustainability report* maka diberi skor 1. Pada penelitian ini, *item-item* CSR menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berjumlah 78 *item*, dimana GRI merupakan standar yang banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia.

2) Definisi Operasional

Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$ = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

ΣX_{ij} = *dummy variable*, yaitu 1 jika item perusahaan diungkapkan, 0 jika item perusahaan tidak diungkapkan (jumlah item yang diungkapkan)

n = jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j , $n_j \leq 78$

Sumber: Alfia (2013)

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas.

2.1. Dewan Komisaris Independen

1) Definisi Konseptual

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006).

Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai rasio antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap dewan komisaris perusahaan (Prasojo, 2011 dalam Putri 2013).

2) Definisi Operasional

Variabel dewan komisaris independen diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan rasio antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

Sumber: Putri (2013)

2.2. Kepemilikan Institusional

1) Definisi Konseptual

Kepemilikan saham institusional (*institutional ownership*) merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persen. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Ujiyantho dan Bambang, 2007).

2) Definisi Operasional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusi. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah minimal 5% terhadap total saham perusahaan. Skala data adalah

skala rasio. Persentase kepemilikan institusional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh istitusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Wiyarsi (2012)

2.3. Komite Audit

1) Definisi Konseptual

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

2) Definisi Operasional

Komite audit diukur dengan proksi jumlah keanggotaan komite audit, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KAUD} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Sumber: Wicaksono (2014)

2.4. Profitabilitas

1) Definisi Konseptual

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosialnya. Dengan

semakin meningkatnya profit suatu perusahaan, maka cadangan dana untuk melakukan aktivitas pengungkapan CSR akan semakin besar, hal tersebut karena biaya untuk pelaksanaan pengungkapan CSR telah tersedia.

2) Definisi Operasional

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan proksi *return on equity* (ROE). ROE dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan kemampuan profitabilitas perusahaan. ROE dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Return on equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Idah (2013)

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik. Alasan mengapa penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengungkapan *corporate social responsibility* dipublikasikan melalui *sustainability report*.
- b. Data sekunder tidak memerlukan biaya yang terlalu besar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dan *sustainability report* yang didapat dari *website* perusahaan atau dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Data untuk variabel luas pengungkapan *corporate social responsibility* diperoleh melalui

laporan *sustainability report* perusahaan. Sedangkan data untuk dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas didapatkan dari *annual report*.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu,

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan (fakta) yang sebenarnya dari suatu penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2003). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2006)

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Level signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,05. Data terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih besar dari 0,05.

2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Dalam penelitian ini, multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat hubungan antar sesama variabel-variabel independennya. Menurut Ghazali (2006), untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dilakukanlah uji multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam sebuah model regresi dapat dicermati dari hal-hal berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika nilai *tolerance*-nya kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinieritas.

2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas) dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Ada beberapa cara

untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006)

2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Menurut Ghozali (2006), autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson ini digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai $dw < dl$, maka akan terjadi autokorelasi positif
2. Jika nilai $dw > (4-dl)$, maka akan terjadi autokorelasi negatif
3. Jika nilai $du < dw < (4-du)$ maka tidak akan terjadi autokorelasi

4. Jika $(4-du) < dw < (4-dl)$ atau $dl < dw < du$, maka pengujian tidak dapat disimpulkan.

3. Uji Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2006). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik terhadap variabel dependen pengungkapan *corporate social responsibility*. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$CSRDI_{it} = \beta_0 + \beta_1DKI + \beta_2KI + \beta_3KAUD + \beta_4PROF$$

Keterangan :

$CSRDI_{it}$ = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan *i* pada tahun *t*

β_0 = *intercept*

β = koefisien regresi berganda

β_1DKI = dewan komisaris independen

β_2KI = kepemilikan institusional

β_3KAUD = komite audit

β_4PROF = profitabilitas

4. Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien dan signifikansi dari tiap-tiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji hipotesis inilah yang akan dijadikan dasar dalam menyatakan apakah hasil penelitian mendukung hipotesis penelitian atau tidak.

4.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedelapan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen secara simultan mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti model semakin baik (Ghozali, 2006).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas mengenai hubungan variabel independen, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas, dengan variabel dependen luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang sahamnya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015. Untuk menentukan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* berturut-turut selama periode 2011-2015 dan dapat diakses melalui *website* perusahaan.
- b. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan secara berturut-turut selama periode 2011-2015.
- c. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 40 sampel yang diperoleh dari 8 perusahaan pertambangan yang memiliki *annual report* dan *sustainability report* dengan periode pengamatan 2011-2015. Rincian pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	46
Perusahaan pertambangan yang tidak mengeluarkan <i>sustainability report</i> secara berturut-turut pada periode 2011-2015	(38)
Jumlah sampel	8
Jumlah Observasi selama tahun 2011-2015	40

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

2. Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terlihat dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas sedangkan variabel dependennya adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report*.

Statistik deskriptif dari 40 sampel dapat dilihat pada tabel IV.3

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	40	.22	.50	.3453	.05113
Kepemilikan Institusional	40	1.06	1.95	1.4414	.22685
Komite Audit	40	3.00	7.00	3.8500	1.14466
Profitabilitas	40	-.09	.65	.1634	.17145
CSR di dalam SR	40	.28	.65	.4728	.08921
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah Penulis (2016)

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif

Tabel IV.3 diatas memberikan informasi mengenai masing-masing variabel independen dan dependen yang akan diuji dalam penelitian ini. Selanjutnya masing-masing variabel dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut :

2.1. Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Hasil *frequency* variabel dapat dilihat pada tabel IV.3 diatas bahwa CSR di dalam SR memiliki nilai rata-rata/mean 0,4728 dan standar deviasi sebesar 0,08921 yang berarti simpangan nilainya lebih kecil daripada meannya yang menunjukkan data tersebut baik dalam merepresentasikan nilai CSR. Dengan nilai terendah terdapat pada perusahaan PT. Petrosea (PTRO) pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,28 dan nilai tertinggi terdapat pada perusahaan PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2015 dengan nilai maksimal 0,65. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada

perusahaan pertambangan masih terbilang rendah. CSR menunjuk pada transparansi pengungkapan sosial perusahaan atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan disekitarnya, (Chresma, 2008). Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, masih belum terlalu besar.

2.2. Dewan Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif variabel dewan komisaris dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.3 diatas yang menunjukkan nilai minimum sebesar 0,22 yang merupakan nilai dewan komisaris independen PT. Vale Indonesia Tbk pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 0,50 yang merupakan nilai PT. Indika Energy Tbk pada tahun 2011, dengan nilai rata-rata dari dewan komisaris independen sebesar 0,3453 menunjukkan angka yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,05113. Hal tersebut menggambarkan bahwa simpangan datanya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut baik dalam merepresentasikan nilai dewan komisaris independen.

2.3. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional merupakan bagian dari variabel independen dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.3 diatas menunjukkan nilai mean sebesar 1,4414. Artinya, secara rata-rata perusahaan tambang di Indonesia sebesar 14% dikuasai oleh institusi lainnya. Dengan nilai maksimum sebesar 1,95 yang merupakan nilai kepemilikan institusional PT. Aneka Tambang Tbk pada tahun 2015 dan nilai minimum sebesar 1,06 yang merupakan nilai kepemilikan institusional dari PT. Bukit Asam pada tahun 2011 dan 2013, menunjukkan saham perusahaan sangat kecil dimiliki oleh institusi lain yang dimaksud diatas. Sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,22672 yang berarti lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa simpangan datanya lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa data tersebut baik dalam merepresentasikan nilai kepemilikan institusional.

2.4. Komite Audit

Variabel komite audit merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan melihat jumlah rapat komite audit dalam suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel komite audit dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.3 diatas memiliki nilai mean sebesar 3,8500. Perusahaan yang memiliki komite audit terendah terdapat pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk (ADRO),

PT. Vale Indonesia Tbk (INCO), PT. Indika Energy Tbk (INDY), PT. Petrosea Tbk (PTRO) selama periode 2011-2015 dan PT. Bukit Asam Tbk pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,00. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat komite audit tertinggi terdapat pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan nilai sebesar 7,00. Standar deviasi untuk variabel komite audit adalah sebesar 1,14466. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya menggambarkan bahwa data tersebut baik dalam merepresentasikan nilai komite audit.

2.5. Profitabilitas

Variabel profitabilitas merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Diukur melalui *Return on Equity* (ROE) yaitu dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah ekuitas perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel profitabilitas dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.3 diatas bahwa nilai profitabilitas terendah yaitu PT. Indika Energy Tbk (INDY) pada tahun 2015 sebesar -0,09 dan nilai tertinggi nilai profitabilitas yaitu PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,65. Adapun nilai mean dari profitabilitas adalah sebesar 0,1634 dan standar deviasi 0,17145. Nilai standar deviasi dari profitabilitas lebih tinggi jika dibandingkan nilai rata-ratanya hal ini menggambarkan bahwa sebaran data tersebut kurang baik dalam merepresentasikan nilai profitabilitas.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dianalisis dengan teknik analisis regresi, maka model persamaan regresi harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu. Model regresi yang baik adalah model regresi yang didalamnya tidak terdapat masalah data yang distribusinya normal, masalah multikolinearitas dan masalah heteroskedastisitas. Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dalam model ini untuk melihat apakah *error term* dalam model mengikuti distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Tujuan digunakannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi sebaran yang normal atau tidak. Uji normalitas data harus dilakukan karena data yang berdistribusi normal, berarti data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Dan data yang berdistribusi normal merupakan syarat dalam melakukan analisis statistik parametrik.

Seperti grafik histogram pada lampiran 6 menunjukkan pola distribusi normal (tidak memiliki kecenderungan ke kanan atau ke kiri grafik) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi

normal. Grafik tersebut menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperjelas sebaran dalam penelitian ini maka disajikan grafik normal *Pplot* seperti pada lampiran 6.

Pada grafik tersebut terlihat distribusi titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data pada penelitian ini normal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Selain melihat uji normalitas melalui histogram dan P-Plot, uji normalitas juga dilakukan secara statistik menggunakan uji *kolmogorov smirnov* (Uji K-S). Normal tidaknya variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diketahui dari nilai *p-value* pada baris *Asymp Sig (2-tailed)* untuk masing-masing variabel. Jika nilai yang tercantum lebih besar dari *level of significant* yaitu 5% atau 0,05 dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel IV.4
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07491885
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.100
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-Tailed)* adalah 0.200 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value*. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antarvariabel

independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik.

Tabel IV.5
Hasil Uji Multikolinearitas (*Coefficients*)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.364	.115		3.182	.003		
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098
Kepemilikan Institusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Tabel IV.6
Hasil Uji Multikolinearitas (*Coefficient Correlations*)

		Coefficient Correlations ^a			
Model		Profitabilitas	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit
1	Correlations				
	Profitabilitas	1.000	.203	-.122	-.398
	Kepemilikan Institusional	.203	1.000	-.244	-.505
	Dewan Komisaris Independen	-.122	-.244	1.000	.271
	Komite Audit	-.398	-.505	.271	1.000
Covariances	Profitabilitas	.006	.001	-.003	.000
	Kepemilikan Institusional	.001	.004	-.004	.000
	Dewan Komisaris Independen	-.003	-.004	.067	.001
	Komite Audit	.000	.000	.001	.000

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Melihat hasil besaran korelasi antara variabel bebas tampak bahwa hanya variabel kepemilikan institusional dan komite audit yang mempunyai korelasi yang tertinggi di antara variabel lainnya dengan tingkat korelasi sebesar -0,505 atau sekitar 50,5%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

1.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis dari penelitian ini adalah jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Seperti grafik scatterplot pada lampiran 6 dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Akan tetapi analisis dengan grafik *plots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil *plotting*. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka akan semakin sulit mengintrepetasikan hasil grafik *plots*. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik yang dapat lebih menjamin keakuratan hasil

uji heteroskedastisitas dengan menguji uji glejser, hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel IV.7 dibawah ini:

Tabel IV.7
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.667	.366		1.823	.077
	Dewan Komisaris Independen	-1.252	.825	-.258	-1.517	.138
	Kepemilikan Institusional	.119	.210	.109	.568	.574
	Komite Audit	-.034	.045	-.156	-.755	.455
	Profitabilitas	.214	.257	.148	.833	.411

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk menguji autokorelasi ini yaitu dengan Uji Durbin-Watson (*DW test*).

Tabel IV.8
Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.214	.07908	2.128

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

b. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Berdasarkan tabel IV.8, dapat dilihat dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $(n) = 40$, serta $k=4$ (adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,2848 dan nilai dU sebesar 1,7209, sehingga nilai $4-dL=2,7152$ dan $4-dU=2,2791$. Penelitian ini memiliki nilai durbin-watson 2,128 yaitu diantara nilai dU dan $4-dU$ ($1,7209 < dw [2,128] < 2,2791$) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sudah memenuhi asumsi autokorelasi.

2. Uji Analisis Regresi Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan uji analisis regresi berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh tingkat dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate social reponsibility* di dalam *sustainability report*. Uji regresi berganda ini dapat dilihat berdasarkan tabel *Coefficient*. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.364	.115		3.182	.003		
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098
Kepemilikan Institusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Tabel IV.9 menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel-variabel independen secara berturut-turut dewan komisaris independen sebesar 0,360; kepemilikan institusional sebesar -0,138; komite audit sebesar 0,053; profitabilitas sebesar -0,124. Sehingga persamaan regresinya menjadi:

$$Y = 0,364 + 0,360DKI - 0,138KI + 0,053KAUD - 0,124PROF$$

Keterangan:

Y = CSR di dalam SR

DKI = Dewan Komisaris Independen

KI = Kepemilikan Institusional

KAUD = Komite Audit

PROF = Profitabilitas

Berdasarkan Tabel IV.9, untuk uji regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta 0,364 artinya jika semua variabel independen tetap (konstan), maka CSR di dalam SR nilainya 0,364
- b. Koefisien regresi variabel dewan komisaris independen (X1) sebesar 0,360; artinya jika variabel dewan komisaris independen mengalami peningkatan satu satuan, maka CSR di dalam SR akan mengalami peningkatan 0,360.
- c. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X2) sebesar – 0,138; artinya jika variabel kepemilikan institusional mengalami peningkatan satu satuan, maka CSR di dalam SR akan berkurang sebesar -0,138.
- d. Koefisien regresi variabel komite audit (X3) sebesar 0,053; artinya jika variabel komite audit mengalami peningkatan satu satuan, maka CSR di dalam SR akan mengalami peningkatan sebesar 0,053.
- e. Koefisien regresi variabel profitabilitas (X4) sebesar -0,124; artinya jika variabel profitabilitas mengalami peningkatan satu satuan, maka CSR di dalam SR akan berkurang sebesar -0,124.

3. Uji Hipotesis

3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan dalam rangka menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi yang ada.

Untuk melakukan uji statistik F, dibentuk hipotesis sebagai berikut :

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas terhadap CSR di dalam SR

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas terhadap CSR di dalam SR

Hasil Uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan sampel sebanyak 40 dan tingkat keyakinan 95%, maka didapat nilai F tabel sebesar 2,64.

Selanjutnya, untuk menentukan apakah hipotesis alternatif mengenai pengaruh simultan keempat variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilakukan perbandingan nilai antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka hipotesis alternatif diterima. Hasil pengujian statistik F yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.10
Uji Kelayakan Model (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.091	4	.023	3.657	.014 ^b
	Residual	.219	35	.006		
	Total	.310	39			

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Berdasarkan tabel IV.10 diatas, uji pengaruh simultan (Uji-F) sebesar $3,657 > 2,64$ dan signifikansi sebesar $0,014$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu CSR di dalam SR secara simultan.

3.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, uji statistik T dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen. Uji t bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana pengaruh satu variabel independen dengan variabel dependen. Dari variabel yang dimasukkan ke dalam model (dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas) serta membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi $0,05$. Nilai t_{tabel} untuk $n=40$ yaitu sebesar $2,03011$. Adapun hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel IV.11
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.364	.115		3.182	.003			
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098	
Kepemilikan Institusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365	
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571	
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189	

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

1. Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR di dalam SR. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,388 < t_{tabel} 2,03011$, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, jadi H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.

2. Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap CSR di dalam SR. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-2,113 > t_{tabel} 2,03011$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $0,042 < 0,05$. Nilai negatif pada t_{hitung} hanya menunjukkan arah pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap CSR di dalam SR yang menuju ke arah negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap CSR di dalam SR.

3. Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap CSR di dalam SR. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel diperoleh nilai t_{hitung}

sebesar $3,802 > t_{\text{tabel}} 2,03011$ sehingga $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, jadi H3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima.

4. Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR di dalam SR. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,544 < t_{\text{tabel}} 2,03011$, sehingga $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, jadi H4 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak.

3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel IV.12
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.214	.07908

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

b. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,214 (21,4%) yang berarti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap CSR di dalam SR. Keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 21,4% sedangkan sisanya 78,6% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Seperti kinerja keuangan lain yaitu likuiditas, solvabilitas dan *leverage*, selain itu ukuran perusahaan dan kualitas audit juga dapat mempengaruhi *corporate social responsibility*.

C. Pembahasan

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dengan melibatkan 40 sampel adalah:

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR) di dalam *sustainability report* (SR) tidak dapat diterima. Karena berdasarkan hasil penelitian ini, dihasilkan bukti bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CSR di dalam SR. Pengujian pada dewan komisaris independen dilakukan dengan melihat jumlah dewan komisaris independen yang dibandingkan dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil uji T, tingkat signifikansi lebih dari 0,05 menjelaskan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap CSR di dalam SR. Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Terzhagi (2012) karena adanya kemungkinan bahwa dewan komisaris independen memiliki kompetensi yang masih lemah. Menurut Restuningdiah (2010), kompetensi dewan komisaris memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, sehingga bukan hanya komposisi dewan komisaris independen yang dipertimbangkan, namun juga pengetahuan dan latar belakang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat komisaris terkait dengan CSR. Meskipun tidak diharuskan, tetapi akan lebih baik jika anggota dewan komisaris independen memiliki kompetensi di bidang ekonomi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil analisis data penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2008), Yuliana, dkk (2008), Wulandari (2009), serta Nugroho dan Yulianto (2015), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility* karena dewan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, penelitian Nurkhin (2010) tersebut

menunjukkan adanya pengaruh positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris independen dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa besarnya proporsi dewan komisaris independen belum tentu meningkatkan atau mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan sosial. Kedua, kemampuan dewan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan.

Hasil uji tersebut memberikan arti bahwa dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan tambang di Indonesia belum dapat menjalankan peran dan fungsinya. Seharusnya keberadaan dewan komisaris independen, dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan komisaris

juga seharusnya dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas dan pengungkapan CSR dengan baik.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di dalam *sustainability report* (SR). Pengujian pada kepemilikan institusional dilakukan dengan melihat jumlah saham yang dimiliki institusional, dimana saham tersebut berupa saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, serta saham pemerintah yang kepemilikan sahamnya minimal 5% dari total saham yang dimiliki perusahaan. Sesuai dengan teori agensi yang mendeskripsikan adanya pengaruh antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Nilai negatif yang menunjukkan arah pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab sosial, kedua variabel memiliki hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) negatif. Adanya hubungan negatif signifikan memiliki makna jika semakin tinggi kepemilikan institusional, maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah kepemilikan institusional, maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi. Hasil penelitian diatas mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih dan Utama

(2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Herawaty (2008), Murwaningsari (2009) serta Nugroho dan Yulianto (2015), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Institusi pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait CSR yang mengawasi manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* yang dimiliki oleh manajer. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial, selain itu juga dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk jangka panjang. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan akan semakin baik. Namun hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan arah negatif. Investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sari

dan Puspita (2015) menyatakan pengaruh negatif tersebut ditimbulkan karena fokus dari pemilik institusional yang berupa lembaga, institusi atau perusahaan adalah berupa laba dari perusahaan yang dapat berdampak langsung pada pengembalian yang didapatkan oleh pemilik institusional dari investasinya pada perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan, semakin besar kepemilikan institusional maka tuntutan pada perusahaan untuk menghasilkan laba akan semakin besar pula sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan efisiensi biaya termasuk pada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya.

Menurut Aprianingsih (2015) kepemilikan institusional memang memiliki jumlah kepemilikan saham yang sangat tinggi sehingga institusi akan cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya malah lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu pihak institusi. Dengan keadaan yang tidak kondusif tersebut maka tidak akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility* (CSR) di dalam *sustainability report* (SR) dapat diterima. Pengujian pada komite audit dilakukan dengan melihat jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh

perusahaan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Hasil penelitian diatas mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Riharjo (2013), Iswandika, dkk (2014), dan Murtanto, dkk (2014) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Priantana & Yustian (2011), Utari (2014), Nugroho & Yulianto (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan karena komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan transparansi perusahaan atau hanya sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan mereview pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* seperti komite audit berkembang dan mengacu pada teori agensi dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengimplikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen akan semakin luas dan efektif sehingga menjamin transparansi

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan membentuk komite audit tidak hanya untuk memenuhi peraturan saja namun juga agar dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan berkaitan dengan review pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan, dan memperhatikan perihal pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, yang digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan sehingga akan banyak investor yang tertarik untuk dapat menanamkan saham, terutama bagi para investor yang peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsinya juga komite audit berperan sangat penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (FCGI, 2002). Peran dan tanggung jawab Komite Audit dalam segi *corporate governance* adalah berupa pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan, memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi tercapainya *good corporate governance*, memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan, memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan (Alijoyo, 2004).

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report*

Hipotesis keempat yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR) di dalam *sustainability report* (SR)

tidak dapat diterima. Pengujian pada profitabilitas dilakukan dengan melihat laba bersih perusahaan yang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Pada dasarnya para pemegang saham tidak hanya menginginkan informasi apakah pendapatan suatu perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Akan tetapi lebih dari itu, para pemegang saham membutuhkan informasi sejauh mana perusahaan dapat menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia, dkk (2011), Putri dan Christiawan (2014), Nugroho dan Yulianto (2015). Dimana ketiganya menghasilkan bahwa profitabilitas terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010), Ramdhaningsih & Utama (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, karena menganggap bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan mengungkapkan informasi CSR yang telah dilakukan. Karena anggapan bahwa aktivitas CSR bukanlah aktivitas yang merugikan bagi perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perusahaan yang tinggi profitabilitasnya belum tentu mengungkapkan informasi CSR secara luas. Menurut Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005)

menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan (manajemen) tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan seperti pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya, dengan asumsi para pembaca laporan tahunan sudah tertarik dengan capaian kinerja keuangan perusahaan yang baik, dalam hal ini profitabilitas. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga aktivitas CSR tidak diungkapkan secara luas, atau hanya untuk memenuhi peraturan saja. Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang rendah, maka perusahaan mengungkapkan CSRnya secara luas, agar para pembaca laporan tertarik dengan laporan aktivitas-aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai upaya pencitraan menutupi rendahnya capaian profitabilitas perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara tingkat dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report*. Periode penelitian ini diambil selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2011-2015 dengan sampel perusahaan pertambangan yang sahamnya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap CSR di dalam SR. Kemampuan manusia untuk berdiskusi dan negosiasi terbatas. Ukuran dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat dalam proses mencari kesepakatan dan membuat keputusan menjadi panjang, dan sulit. Sehingga besarnya anggota dewan komisaris belum dapat dikatakan efektif sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi agar manajemen menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang diinginkan para stakeholder, terkait aspek sosial dan lingkungan.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR di dalam SR. Hubungan negatif signifikan memiliki makna semakin besar kepemilikan institusional, maka

tingkat pengungkapan CSR akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Kepemilikan institusional memiliki jumlah kepemilikan saham yang tinggi sehingga institusi cenderung bertindak untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan. Kondisi yang tidak kondusif tidak akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap pengungkapan CSR di dalam SR. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Karena anggota komite audit dapat bersikap netral terhadap manajemen, sehingga dapat bertindak secara objektif dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dan pada akhirnya dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap CSR di dalam SR. Penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perusahaan yang tinggi profitabilitasnya belum tentu mengungkapkan informasi CSR secara luas. Ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tidak perlu mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya, dengan asumsi para pembaca laporan tahunan

sudah tertarik dengan capaian kinerja keuangan perusahaan yang baik, dalam hal ini profitabilitas. Sehingga aktivitas CSR tidak diungkapkan secara luas, atau hanya untuk memenuhi peraturan saja.

B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi CSR di dalam SR dengan arah negatif dan komite audit mempengaruhi CSR di dalam SR dengan arah yang positif, sedangkan dewan komisaris independen dan profitabilitas tidak mempengaruhi CSR di dalam SR secara signifikan. Adapun implikasi pada masing-masing variabel antara lain:

1. Dewan komisaris independen sebagai salah satu variabel yang memiliki peranan penting dalam implementasi *corporate governance*. Secara umum dewan komisaris independen ditugaskan untuk melakukan pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen dapat mendorong Dewan Komisaris mengambil keputusan secara objektif yang dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan karena komisaris independen dapat bersifat netral dan objektif terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Adanya dewan komisaris, pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi termasuk informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Kepemilikan institusional terbukti menjadi salah satu faktor yang menentukan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial. Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang

dilakukan oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Penelitian yang menghasilkan pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan arah negatif, pengaruh negatif tersebut dapat ditimbulkan karena fokus para pemilik institusional terhadap laba perusahaan. Dapat dikatakan, semakin besarnya kepemilikan institusional maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menghasilkan laba akan semakin besar.

3. Komite audit menjadi faktor lain yang menentukan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komite audit yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memiliki beberapa keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan antara lain :

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan pertambangan di Indonesia yang hanya memiliki *sustainability report* selama 5 tahun berturut-turut, sehingga masih relatif sedikit, yaitu sebanyak 40 sampel (8 x 5 tahun) dari 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar manajemen perusahaan diharapkan lebih lengkap dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam laporan *sustainability report* (SR).
2. Variabel-variabel yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas saja. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian selanjutnya dapat menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di dalam *sustainability report* (SR).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Retno Fr (2006) "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang: 30-45
- Bapepam. 2000. *Surat Edaran Bapepam*. No.SE-03/PM/2000 Tentang Komite Audit.
- Bapepam. 2004. *Surat Keputusan Ketua Bapepam*. Kep 29/PM/2004.
- Daniri, Mas Achmad. 2008. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". <http://www.madani-ri.com>
- Darwin, Ali. 2004. "Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia". Konvensi Nasional Akuntansi V. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Effendi, Muh. Arief. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- GRI. (2010). "Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, London". <http://www.globalreporting.org>.
- Iswandika, dkk. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. E-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Tentang Komisaris Independen*. <http://www.governance-indonesia.or.id/main.htm>.
- Laporan Keuangan Tahunan diakses melalui <http://www.idx.co.id>.
- Mutia, Evi dkk. 2011. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi

- Nugroho, Yulianto. 2015. *Pengaruh Profitabilitas dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar JII 2011-2013*. Accounting Analysis Journal
- Nurkhin, Ahmad. 2010. *Corporate Govenance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 2, No. 1 Hal: 73-85.
- Pamungkas, Dian Putri. (2012). "Pengaruh CGC Terhadap Implementasi CSR Pada Industri Pertambangan dan Penggalian (BUMN Persero Terbuka)". *Jurnal Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Priantana, Yustian. 2011. *Pengaruh Struktur Good Corporate Social Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*
- Puspitasari, Apriani Daning. (2009). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR Pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Putri, Chyinthia Dwi. 2013. "Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI)". *Jurnal UNP*
- Ramdhaniingsih, Utama. 2013. *Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN : 2302-8556
- Ratnasari, Yunita. 2011. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report". *Jurnal Akuntansi UNDIP*.
- Rohmah, Dita. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Dalam Sustainability". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*
- Rustiarini. Ni Wayan. (2010). "Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Sari, Rani. 2015. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return On Assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*

- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta." Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo, 15-16 September 2005.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudana, I Made dan Putu Ayu Arlindania W. 2011. "Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Manajemen Teori & Terapan Vol. 4, No. 1
- Susanti, Riharjo. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics and Household*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 1.
- Terzaghi, Muhammad Titan. (2012). "Pengaruh Earning Management Dan Mekanisme CG Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI". Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. 2011. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vo.21 No.3
- Utari, Margaretha Dita. 2014. "Analisis Pengaruh Kriteria Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Tanjungpura. Vol. 3, No. 1 Hal. 53-80
- Wahana Komputer. 2014. "Analisis Data Penelitian dengan SPSS 22." Andi Offset : Yogyakarta
- Waryanto. (2010). "Pengaruh Karakteristik GCG Terhadap Pengungkapan CSR Di Indonesia". Skripsi. Undip.
- Widianto, Hari Suryoni. (2011). "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report". Skripsi. Universitas Diponegoro.

<http://www.portal-statistik.com/2014/05/cara-membaca-atau-melihat-tabel-t.html> di akses tanggal 07 Agustus 2016

<http://www.portal-statistik.com/2014/05/cara-membaca-atau-melihat-tabel-f.html> di akses tanggal 07 Agustus 2016

<http://www.portal-statistik.com/2014/02/statistik-deskriptif-dengan-spss.html> di akses tanggal 07 Agustus 2016

<http://www.portal-statistik.com/2014/02/uji-normalitas-dengan-menggunakan-spss.html> di akses tanggal 07 Agustus 2016

Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI

INDIKATOR KINERJA EKONOMI	
Kinerja Ekonomi	
EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal pemerintah
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
EC 3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
EC 4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
Keberadaan Pasar	
EC 5	Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi operasi.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC 8	Pengembangan dan dambak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono.
EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN	
Material	
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran .
EN	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan
Energi	
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak langsung
EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisensi dan konserfasi yang lebih baik.
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai

	dampak dari inisiatif ini.
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Air	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, di kelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.
Emisi, Effluent, dan Limbah	
EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
EN 21	Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara international.
EN	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman

25	hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .
Produk dan Jasa.	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.
Kesesuaian	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Transport	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.
Keselarasan	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
Indikator Praktek Tenaga kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak	
LA 1	Komposisi tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi
LA2	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.
LA 3	Benefityang diberikan kepada pegawai tetap
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen	
LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif
LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama
Keselamatan dan Keselamatan Kerja	
LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.

LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja
Pendidikan dan Pelatihan	
LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai
LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk terus berkarya.
LA 12	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.
Keanekaragaman dan KesempatanYang Sama	
LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.
LA 14	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA	
Praktik Investasi dan Pengadaan	
HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manussia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan
HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
Non-Diskriminasi	
HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalahyang

	diambil
Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok	
HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.
Tenaga Kerja Anak	
HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak
Pegawai Tetap dan Kontrak	
HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.
Praktik keselamatan	
HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.
Hak Masyarakat (Adat)	
HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN	
Kemasyarakatan	
SO 1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.
Korupsi	
SO 2	Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki risiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi
SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi

Kebijakan Publik	
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi
SO 6	Perolehan keuntungan secara financial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisidan instansiterkait oleh Negara
Perilaku anti Persaingan	
SO 8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK PRODUK	
Keselamatan dan kesehatan Konsumen	
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yaang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Labelling Produk dan jasa	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
PR 5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.
Komunikasi Pemasaran	
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
PR 7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.

Privasi Konsumen	
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.
Kesesuaian	
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : GRI (global Reporting Initiatives) G3 Guidelines

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

NO.	EMITEN	KODE PERUSAHAAN	ANNUAL REPORT					SUSTAINABILITY REPORT				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	PT Atlas Resources Tbk	ARII	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
3	PT ATPK Resources Tbk	ATPK	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
4	PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk	BORN	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X
5	PR Berau Coral Energy Tbk	BRAU	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
6	PT Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR	V	V	V	X	V	X	X	X	X	X
7	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
8	PT Bayan Resources Tbk	BYAN	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
9	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
10	PT Delta Dunia Propertindo Tbk	DOID	X	X	V	V	V	X	X	X	X	X
11	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
12	PT Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
13	PT Harum Energy Tbk	HRUM	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
14	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15	PT Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
16	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	X	X	X	V	V	X	X	X	X	X
17	PT Myoh Technology Tbk	MYOH	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
18	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
19	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20	PT Petrosea Tbk	PTRO	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21	PT Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
22	PT Permata Prima Sakti Tbk	TKGA	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X

23	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
24	PT Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
25	PT Benakat Integra Tbk	BIPI	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
26	PT Elnusa Tbk	ELSA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
27	PT Energi Mega Persada Tbk	ENRG	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
28	PT Surya Esa Perkasa Tbk	ESSA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
29	PT Medco Energi International Tbk	MEDC	V	V	V	V	V	X	X	V	V	X
30	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
31	PT Citatah Tbk	CTTH	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
32	PT Mitra Investindo Tbk	MITI	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
33	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
34	PT Cita Mineral Investindo Tbk	CITA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
35	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk	CKRA	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
36	PT Central Omega Resources Tbk	DKFT	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
37	PT Vale Indonesia Tbk	INCO	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
38	PT Merdeka Copper Gold Tbk	MDKA	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X
39	PT J Resources Asia Pasific Tbk	PSAB	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
40	PT SMR Utama Tbk	SMRU	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X
41	PT Timah (Persero) Tbk	TINS	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
42	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	APEX	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
43	PT Indika Energy Tbk	INDY	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
44	PT Leyand International Tbk	LAPD	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X
45	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
46	PT Sugih Energy Tbk	SUGI	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X

Note :

Mengeluarkan AR & SR 5 Tahun Berturut-turut

REKAP VARIABEL DEPENDEN & VARIABEL INDEPENDEN

Tahun	EMITEN	Y	X1	X2	X3	X4
2011	ADRO	0,461538	0,333333	1,189576	3	0,226066
	ANTM	0,564103	0,333333	1,521622	7	0,178972
	INCO	0,358974	0,222222	1,257766	3	0,188655
	INDY	0,423077	0,5	1,575457	3	0,161758
	ITMG	0,320513	0,333333	1,53846	4	0,654064
	PGAS	0,474359	0,4	1,755481	5	0,373479
	PTBA	0,602564	0,285714	1,06955	5	0,378339
	PTRO	0,282051	0,428571	1,432649	3	0,330606
2012	ADRO	0,487179	0,333333	1,189576	3	0,12798
	ANTM	0,589744	0,333333	1,521622	6	0,233248
	INCO	0,358974	0,3	1,257766	3	0,036456
	INDY	0,461538	0,4	1,575457	3	0,085104
	ITMG	0,346154	0,333333	1,53846	4	0,557092
	PGAS	0,512821	0,333333	1,755481	5	0,388678
	PTBA	0,589744	0,333333	1,06955	3	0,342077
	PTRO	0,487179	0,428571	1,432649	3	0,262278
2013	ADRO	0,487179	0,4	1,178562	3	0,073088
	ANTM	0,576923	0,333333	1,572472	6	0,032043
	INCO	0,371795	0,3	1,257766	3	0,025032
	INDY	0,461538	0,333333	1,575457	3	-0,05664
	ITMG	0,320513	0,333333	1,53846	4	0,239127
	PGAS	0,512821	0,333333	1,755481	7	0,327763
	PTBA	0,564103	0,333333	1,059822	4	0,245549
	PTRO	0,474359	0,428571	1,432649	3	0,087602
2014	ADRO	0,500000	0,4	1,178167	3	0,056333
	ANTM	0,589744	0,333333	1,572472	4	-0,06499
	INCO	0,397436	0,3	1,257766	3	0,095861
	INDY	0,461538	0,333333	1,575457	3	-0,03342
	ITMG	0,410256	0,333333	1,537121	4	0,227183
	PGAS	0,525641	0,333333	1,755481	5	0,25233
	PTBA	0,551282	0,333333	1,095346	4	0,232874
	PTRO	0,423077	0,25	1,432649	3	0,011684
2015	ADRO	0,538462	0,4	1,151954	3	0,045035
	ANTM	0,551282	0,333333	1,952558	4	-0,07866
	INCO	0,435897	0,3	1,257766	3	0,026502
	INDY	0,461538	0,333333	1,575457	3	-0,08901
	ITMG	0,346154	0,333333	1,535076	4	0,075617
	PGAS	0,500000	0,333333	1,755481	5	0,13324
	PTBA	0,653846	0,333333	1,538049	4	0,219338
	PTRO	0,474359	0,4	1,432649	3	-0,07119

VARIABEL INDEPENDEN
DAFTAR INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR MENURUT GRI

Total GRI = 78 Item

INDIKATOR KINERJA EKONOMI		2011								2012							
		ADRO	ANTM	INCO	INDY	ITMG	PGAS	PTBA	PTRO	ADRO	ANTM	INCO	INDY	ITMG	PGAS	PTBA	PTRO
EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal pemerintah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
EC 3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
EC 4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keberadaan Pasar																	
EC 5	Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi operasi.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung																	
EC 8	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN																	
Material																	
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran .	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak langsung	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
Air																	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang daur ulang dan digunakan kembali	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
Keanekaragaman Hayati																	
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Emisi, Effluent, dan Limbah																	
EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

EN 21	Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara international.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produk dan Jasa.																	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian																	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Transport																	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keselarasn																	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasakan jenis kegiatan.	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL																	
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK																	
LA 1	Komposisi tenaga kerja berdasakan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
LA 2	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarjkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen																	
LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Keselamatan dan Keselamatan Kerja																	
LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
Pendidikan dan Pelatihan																	
LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk terus berkarya.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
LA 12	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama																	
LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
LA 14	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA																	
Praktik Investasi dan Pengadaan																	
HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Non-Diskriminasi																	
HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL																	

Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok																	
HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
Tenaga Kerja Anak																	
HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pegawai Tetap dan Kontrak																	
HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Praktik keselamatan																	
HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Hak Masyarakat (Adat)																	
HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN																	
Kemasyarakatan																	
SO 1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Korupsi																	
SO 2	Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Kebijakan Publik																	
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
SO 6	Perolehan keuntungan secara financial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perilaku anti Persaingan																	
SO 7	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK PRODUK																	
Keselamatan dan kesehatan Konsumen																	
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1

	yang terkait dalam prosedur tersebut.																
PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labeling Produk dan jasa																	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
PR 5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Komunikasi Pemasaran																	
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
PR 7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privasi Konsumen																	
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian																	
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
TOTAL CSR		0.46	0.56	0.36	0.42	0.32	0.47	0.60	0.28	0.49	0.59	0.40	0.46	0.35	0.51	0.59	0.49

VARIABEL INDEPENDEN
DAFTAR INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR MENURUT GRI

Total GRI = 78 Item

INDIKATOR KINERJA EKONOMI		2013								2014							
		ADRO	ANTM	INCO	INDY	ITMG	PGAS	PTBA	PTRO	ADRO	ANTM	INCO	INDY	ITMG	PGAS	PTBA	PTRO
EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal pemerintah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
EC 3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
EC 4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keberadaan Pasar																	
EC 5	Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi operasi.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung																	
EC 8	Pengembangan dan dambak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN																	
Material																	
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak langsung	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1

EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Air																	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Keanekaragaman Hayati																	
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Emisi, Effluent, dan Limbah																	
EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 19	Emisi dan subansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1

EN 21	Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara international.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Produk dan Jasa.																	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian																	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport																	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya. .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keselaran																	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasakan jenis kegiatan.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL																	
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK																	
LA 1	Komposisi tenaga kerja berdasakan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
LA 2	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarjkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen																	
LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Keselamatan dan Keselamatan Kerja																	
LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Pendidikan dan Pelatihan																	
LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk terus berkarya.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
LA 12	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama																	
LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 14	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA																	
Praktik Investasi dan Pengadaan																	
HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Non-Diskriminasi																	
HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok																	
HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Tenaga Kerja Anak																	
HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pegawai Tetap dan Kontrak																	
HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Praktik keselamatan																	
HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Hak Masyarakat (Adat)																	
HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN																	
Kemasyarakatan																	
SO 1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Korupsi																	
SO 2	Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
Kebijakan Publik																	
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
SO 6	Perolehan keuntungan secara financial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisidan instansi terkait oleh Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perilaku anti Persaingan																	
SO 7	Nilai monetor dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK PRODUK																	
Keselamatan dan kesehatan Konsumen																	
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0

	yang terkait dalam prosedur tersebut.																
PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yaang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labelling Produk dan jasa																	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR 5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Komunikasi Pemasaran																	
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PR 7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privasi Konsumen																	
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian																	
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
TOTAL CSR		0.49	0.58	0.37	0.46	0.32	0.51	0.56	0.47	0.50	0.59	0.36	0.46	0.41	0.53	0.55	0.42

VARIABEL INDEPENDEN
DAFTAR INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR MENURUT GRI

Total GRI = 78 Item

INDIKATOR KINERJA EKONOMI		2015							
		ADRO	ANTM	INCO	INDY	ITMG	PGAS	PTBA	PTRO
Kinerja Ekonomi									
EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal pemerintah	1	1	1	1	1	1	1	1
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.	0	0	0	1	0	0	1	0
EC 3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.	1	1	1	0	0	0	1	1
EC 4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0
Keberadaan Pasar									
EC 5	Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.	1	0	0	1	1	1	1	1
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.	0	0	0	0	0	0	0	1
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi operasi.	1	0	0	0	0	0	1	1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung									
EC 8	Pengembangan dan dambak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono.	1	1	1	1	1	1	1	0
EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.	1	0	1	1	1	1	1	0
TOTAL									
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN									
Material									
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasi berdasarkan berat dan ukuran .	1	1	1	1	0	1	0	1
EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan	1	1	1	0	0	0	1	0
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak langsung	1	0	0	1	1	1	1	1

EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.	1	0	1	1	1	0	0	1
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.	1	1	0	1	0	1	1	1
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	1	1	0	0	1	1
Air									
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.	1	1	1	1	1	0	1	1
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali	0	1	0	1	0	0	1	0
Keanekaragaman Hayati									
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi	0	1	1	1	0	1	1	0
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.	0	1	0	0	0	0	1	0
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali	0	1	1	0	1	0	1	1
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	1	1	0	0	1	1	0	1
EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.	0	1	0	0	0	0	1	0
Emisi, Effluent, dan Limbah									
EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.	1	1	1	1	0	1	1	0
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	1	1	1	1	0	1	1	1
EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.	0	0	0	0	0	0	1	0
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.	1	0	1	0	1	1	1	1

EN 21	Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan	1	1	1	1	1	1	1	1
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.	1	1	1	0	1	1	1	1
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah	0	0	1	0	0	0	1	0
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara international.	0	0	0	0	0	0	1	0
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .	0	0	0	0	0	0	1	0
Produk dan Jasa.									
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.	1	0	0	1	0	1	1	1
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian									
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	1	0	1	0
Transport									
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya. -	0	1	1	0	0	1	1	0
Keselaranan									
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasakan jenis kegiatan.	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL									
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK									
LA 1	Komposisi tenaga kerja berdasakan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi	1	1	0	1	0	0	0	0
LA 2	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap	1	1	1	1	0	1	1	0
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen									
LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif	0	1	0	0	0	1	0	1
LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama	0	1	0	0	0	1	1	0

Keselamatan dan Keselamatan Kerja									
LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.	1	1	1	1	0	1	1	1
LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.	1	1	0	1	0	0	0	0
LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja	1	0	0	1	0	1	0	0
Pendidikan dan Pelatihan									
LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai	1	1	1	1	1	1	1	1
LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk terus berkarya.	1	0	0	0	0	1	1	0
LA 12	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.	0	0	1	0	1	0	0	1
Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama									
LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya.	1	1	1	1	0	1	1	1
LA 14	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.	1	0	0	0	1	1	1	1
TOTAL									
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA									
Praktik Investasi dan Pengadaan									
HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.	0	1	0	0	0	0	0	0
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan	0	0	0	0	0	0	0	0
HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.	0	1	0	0	0	1	1	0
Non-Diskriminasi									
HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil	0	1	0	0	1	0	1	0
Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok									

HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.	0	1	0	1	0	0	0	1
Tenaga Kerja Anak									
HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak	1	0	0	0	0	0	0	0
Pegawai Tetap dan Kontrak									
HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.	0	0	0	0	0	0	0	0
Praktik keselamatan									
HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja	1	1	1	0	0	1	1	1
Hak Masyarakat (Adat)									
HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									
INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN									
Kemasyarakatan									
SO 1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.	0	1	1	0	1	0	0	1
Korupsi									
SO 2	Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki risiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi	0	1	1	0	0	1	0	0
SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi	0	1	1	0	1	1	1	0
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi	1	0	0	1	0	1	1	1
Kebijakan Publik									
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi	0	0	0	1	0	0	0	1
SO 6	Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisidan instansi terkait oleh Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
Perilaku anti Persaingan									
SO 7	Nilai monetor dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK PRODUK									
Keselamatan dan kesehatan Konsumen									
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.	1	0	0	1	0	0	0	1

PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yaang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	0	0	0	0	0	0	1	0
Labelling Produk dan jasa									
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut	1	1	1	1	0	1	1	1
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	0	0	0	0	1	1	1	0
PR 5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.	1	1	0	1	1	1	1	1
Komunikasi Pemasaran									
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	1	0	0	0	0	0	0	0
PR 7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Privasi Konsumen									
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian									
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									
TOTAL CSR		0.54	0.55	0.44	0.46	0.35	0.50	0.65	0.47

Hasil Pengolahan Data Statistik

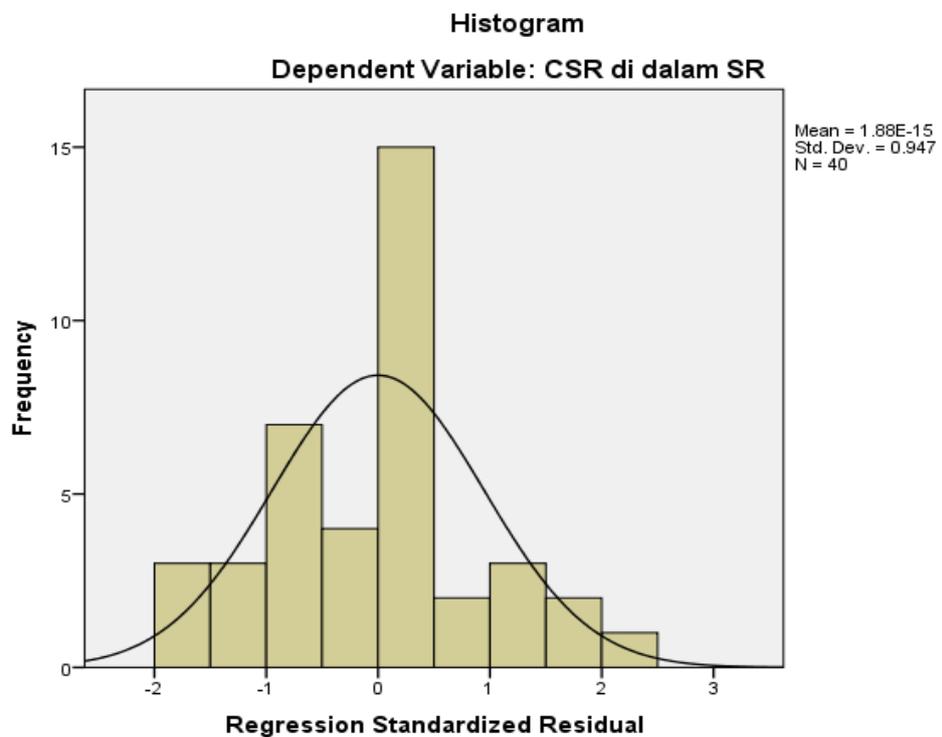
1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	40	.22	.50	.3453	.05113
Kepemilikan Instusional	40	1.06	1.95	1.4414	.22685
Komite Audit	40	3.00	7.00	3.8500	1.14466
Profitabilitas	40	-.09	.65	.1634	.17145
CSR di dalam SR	40	.28	.65	.4728	.08921
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data diolah Penulis (2016)

2. Uji Asumsi Klasik

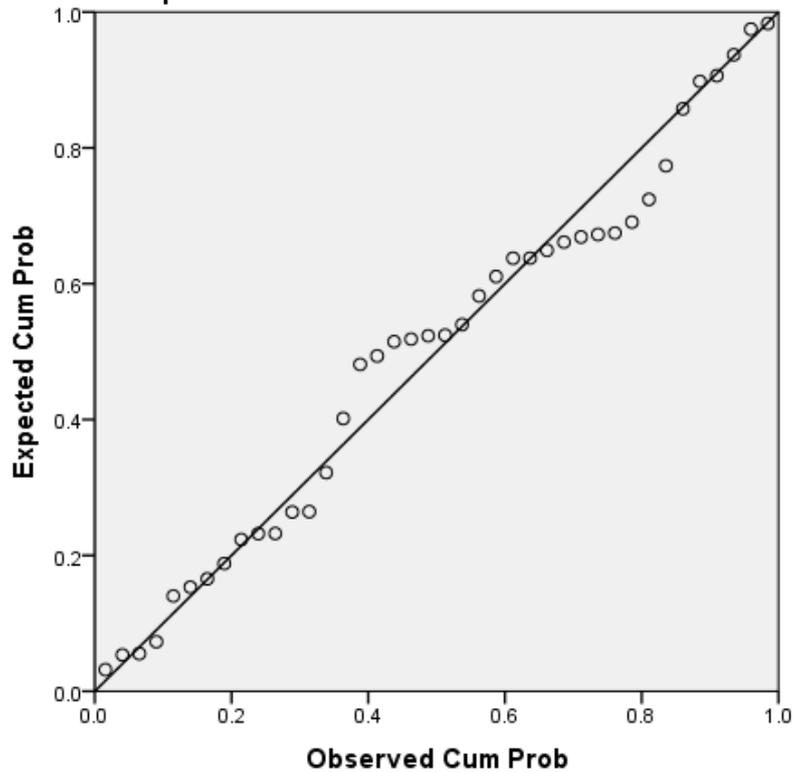
2.1. Uji Normalitas



Gambar Histogram Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: CSR di dalam SR



Grafik P-Plot Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07491885
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.100
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 5

2.2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	.364	.115				3.182
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098
Kepemilikan Institusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189

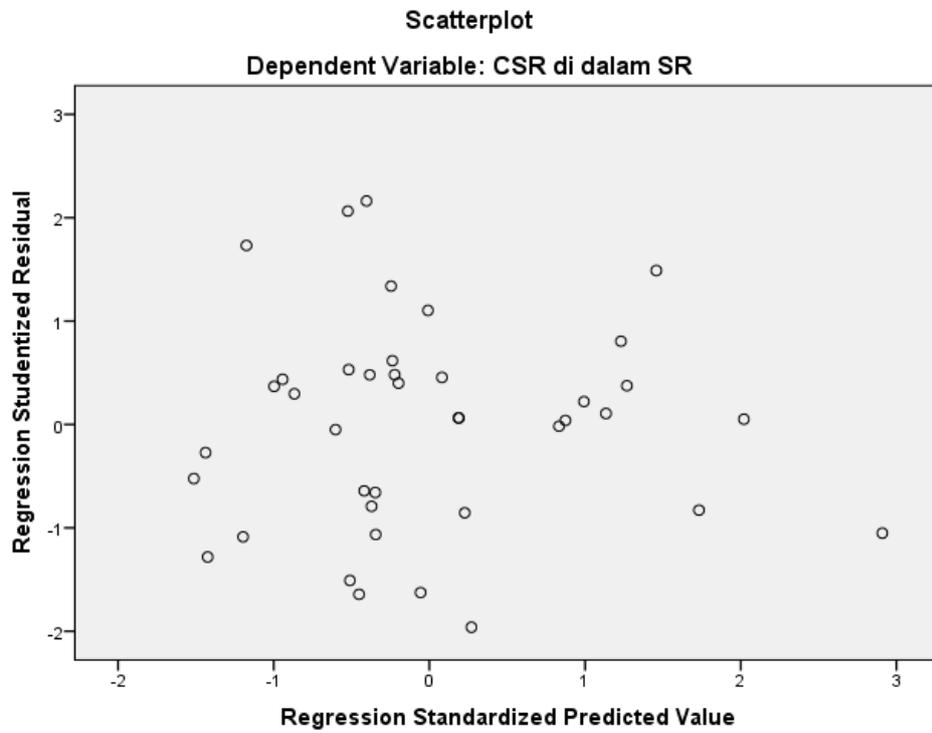
a. Dependent Variable: CSR di dalam SR
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

Coefficient Correlations^a

Model		Profitabilitas	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris	
				Independen	Komite Audit
1 Correlations	Profitabilitas	1.000	.203	-.122	-.398
	Kepemilikan Institusional	.203	1.000	-.244	-.505
	Dewan Komisaris Independen	-.122	-.244	1.000	.271
	Komite Audit	-.398	-.505	.271	1.000
	Covariances	Profitabilitas	.006	.001	-.003
Covariances	Kepemilikan Institusional	.001	.004	-.004	.000
	Dewan Komisaris Independen	-.003	-.004	.067	.001
	Komite Audit	.000	.000	.001	.000

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

2.3. Uji Heterokedastisitas



Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.667	.366		1.823	.077
Dewan Komisaris Independen	-1.252	.825	-.258	-1.517	.138
Kepemilikan Institusional	.119	.210	.109	.568	.574
Komite Audit	-.034	.045	-.156	-.755	.455
Profitabilitas	.214	.257	.148	.833	.411

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

2.4. Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.214	.07908	2.128

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Instiusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

b. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

3. Analisis Regresi Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	.364	.115				3.182
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098
Kepemilikan Instiusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

4. Uji Statistik F

Uji Kelayakan Model (Uji-F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.091	4	.023	3.657	.014 ^b
Residual	.219	35	.006		
Total	.310	39			

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR

LAMPIRAN 5

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

5. Uji Statistik T

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.364	.115		3.182	.003			
Dewan Komisaris Independen	.360	.259	.206	1.388	.174	.911	1.098	
Kepemilikan Institusional	-.138	.065	-.350	-2.113	.042	.733	1.365	
Komite Audit	.053	.014	.676	3.802	.001	.637	1.571	
Profitabilitas	-.124	.081	-.239	-1.544	.132	.841	1.189	

a. Dependent Variable: CSR di dalam SR
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.214	.07908

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit
 b. Dependent Variable: CSR di dalam SR
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)



Building Future Leaders

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : MEIDA LISTIYANA
2. No.Registrasi : 8335145413
3. Program Studi : AKUNTANSI
4. Dosen Pembimbing I : ETY SUPENDRAWATI NIP. 19680314 199203 2 002
5. Dosen Pembimbing II : RIDA PRIHATNI NIP. 19760425 200112 2 002

6. Judul Skripsi : Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1		Pengajuan judul	saran untuk penulisan latar belakang		
2	16 Februari 2016	Mengajukan Bab I	Memahami lebih tentang CSR & untuk pengajuan BAB I		
3	17 Februari 2016	Pengajuan Bab I	Revisi bab I		
4	21 Februari 2016	Mengajukan Revisi Bab I & Bab II	Revisi Bab II		
5	17 Maret 2016	Mengajukan Revisi Bab II & Bab III			
6	14 Mei 2016	Acc proposal			
7	8 Agustus 2016	Mengajukan Bab IV	Revisi Bab IV		
8					
9	27 September 2016	Mengajukan Revisi Bab IV			
10					
11	11 Oktober 2016	Acc skripsi			
12					
13					
14					
SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI					

Catatan :

1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : MEIDA LISTIYANA
 2. No.Registrasi : 8335145413
 3. Program Studi : AKUNTANSI
 4. Dosen Pembimbing I : ETTY GURENDRAWATI NIP. 19680314 199203 2 002
 5. Dosen Pembimbing II : RIDA PRIHATNI NIP. 19760425 200112 2 002
 6. Judul Skripsi : Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI	DP II
1		Pengajuan judul	Menambah pemahaman variabel γ		
2	24 Feb 2016	Mengajukan Bab I dan II	revisi bab I dan revisi bab II		
3	10 Maret 2016	Mengajukan Bab I - Bab III	Revisi bab I, II dan III		
4		Mengajukan Revisi Bab I, II & III			
5	18 Agustus 2016	Mengajukan Bab IV dan Bab V	Revisi Bab IV		
6	13 Oktober 2016	Mengajukan Revisi Bab IV	Revisi bab IV & V		
7	20 Oktober 2016	Mengajukan Revisi Bab IV dan V			
8	10 November 2016	Mengajukan Revisi Bab IV & V	ACC Skripsi		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI					

Catatan :

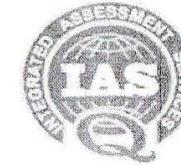
- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R. Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285 Fax. (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO
IAS-INA-3640

FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Mahasiswa | : MEIDA LISTIYANA |
| 2. No.Registrasi | : 8335145413 |
| 3. Jurusan/Program Studi | : EKONOMI / SI AKUNTANSI |
| 4. Tanggal Ujian Skripsi | : 20 DESEMBER 2016 |

NO	NAMA PENGUJI/PEMBERI SARAN	MASALAH SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	TANDA TANGAN PEMBERI SARAN
1	Indra Pahala	- Penjelasan tambahan variabel x_2 terhadap y		
2		- Format penulisan		
3	Huramalia Hasanah	- Memindahkan hasil uji normalitas, heteroskedas-		
4		- tatus berbentuk grafik ke lampiran		
5		- Menambahkan penjelasan pada variabel		
6		- kepeinitikan institusional terhadap CSR		
7	Indah Mylra Sari	- Menambahkan tentang pentingnya pelaporan di SR		
8		- Penjelasan tambahan tentang GRI		
9		- Penjelasan tambahan variabel x_2 terhadap y		
10				
Sudah diperbaiki sesuai saran ==> SETUJU DIPERBANYAK ==>		Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	

Catatan :

1. Pada waktu konsultasi perbaikan/penyempurnaan skripsi, kartu ini harus diperlihatkan kepada Pembimbing (I dan II)
2. Target perbaikan/penyempurnaan skripsi setelah tanggal ujian
3. Kartu ini harus dilampirkan pada waktu meminta tanda tangan Tim Penguji untuk penyerahan skripsi



RIWAYAT HIDUP

Meida Listiyana, lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Mei 1992, merupakan anak bungsu dari pasangan Drs. Sumitro, M.Sc dan Sukaendah, S.pd. Bertempat tinggal di Jl. Garuda Jaya Blok B No. 101 RT 008 RW 012, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria – Bekasi 17131. Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Kaliabang Tengah III pada tahun 1998 - 2004, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 19 Bekasi pada tahun 2004 - 2007, dengan melanjutkan pendidikan menengah atas ke SMAN 4 Bekasi pada tahun 2007 – 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikan Diploma III (D3) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen.